HARIAN UMUM NusaBali

Dugaan Pencaplokan Sempadan Pantai di Canggu

MANGUPURA, NusaBali

Dugaan pelanggaran sempadan pantai di Canggu yang dinilai telah menimbulkan kegaduhan serta protes masyarakat mendapat perhatian Pemkab Badung. Bupati Badung Anak Agung Gde Agung di hadapan SKPD di lingkungan Pemkab Badung, Senin (13/4), meminta segenap jajarannya untuk mengambil tindakan tegas.

"Kehadiran pemerintah adalah wajib melindungi kepentingan umum, terlebih untuk kepentingan masyarakat dalam melaksanakan sradha bhaktinya yakni untuk akses jalan melakukan pemelastian, akses jalan menuju setra dan akses jalan melaksanakan bhakti dan upacara di Pura Batu Mejan tersebut wajib dilindungi," tegas Bupati Gde Agung.

Dikatakannya, menyikapi permasalahan adanya tembok pembatas atau penyengker sebagaimana ditulis media, posisi pemkab adalah tegas berpijak pada aturan dan melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karenanya Bupati menginstruksikan Satpol PP Badung untuk melakukan tidakan tegas dengan melakukan penertiban. Bahkan Bupati meminta agar Selasa (14/4) hari ini mengecek secara teliti dengan melibatkan segenap SKPD terkait, sehingga langkah penertiban terhadap tembok yang diduga dibangun oleh Canggu Intercontinental tersebut dapat berjalan dengan mengikuti prinsip-prinsip normatif dan prosedural.

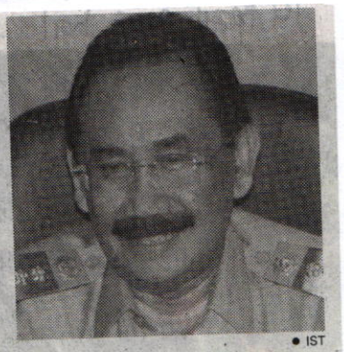

• IST

Bupati AA Gde Agung.

Sikap tegas Bupati tersebut disampaikan saat rapat koordinasi teknis dengan sejumlah instansi terkait lingkup Pemkab Badung, yang dihadiri oleh Sekkab Kompyang R Swandika, Kepala BPPT Made Sutama, Kadis DCK Dessy Dharmayanti, Kepala BLH Badung Ketut Sudarsana, Kasatpol PP Ketut Martha, Camat Kuta Utara AA Yuyun Hanura Eny, staf Perbekel Canggu serta SKPD terkait lainnya di ruang rapat bupati.

Menurut Bupati Gde Agung, bahwa apapun bentuk bangunan yang dibangun wajib mengikuti aturan serta ketentuan dari instansi yang berwenang. Bupati minta agar staf jajarannya meneliti di lapangan bahwa tembok yang dibangun tersebut harus memiliki izin revertmen (pembuatan tanggul pemecah ombak). Bangunan tersebut difungsikan untuk menahan ombak serta wajib mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam revertmen.

"Berkenaan dengan adanya kesepakatan dengan warga, apapun bentuk kesepakatan yang dibuat tidak boleh merugikan kepentingan umum, apalagi untuk melaksanakan kewajiban ibadah agama, adat, dan budaya," tegas Gde Agung.

Hal senada diungkapkan oleh Kompyang R Swandika, bahwa bila terdapat permasalahan berkenaan dengan persoalan tanah atau sengketa atas tanah adalah kewajiban pemerintah untuk memfasilitasinya. Terkait tembok ini harus mengikuti peraturan, demikian pula kalau revertmen juga harus ada izinnya dan sesuai dengan aturan. Selama ini kalau tembok itu berfungsi revertmen itu wajib ada izinnya. Selama ini jalan tersebut secara de facto telah dipakai masyarakat umum maka wajib diutamakan termasuk untuk akses jalan menuju ke Pura Batu Mejan.

Camat Kuta Utara Yuyun Hanura Eny, menambahkan situasi yang terjadi di bawah memang ada pertanyaan masyarakat terkait pembangunan tersebut. Sesungguhnya, masyarakat tidak apriori terkait pembangunan pariwisata, dari langkah awal sesungguhnya sudah baik, pihak investor juga sudah sosialisasi. Namun dalam kesepakatan yang dibangun sepertinya investor menganggap dirinya sudah benar, terutama terkait keberatan warga menyangkut jalan setra, dan kahyangan, demikian juga dengan kesepakatan ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan. "Dengan demikian maka bila dilihat dari perencanaan yang ada tampaknya belum bisa diterima masyarakat. Masyarakat menolak pembangunan tembok yang menghalangi akses mereka untuk melakukan ritual keagamaan dan adat," tandasnya. @

Edisi : Selasa, 14 April 2015

Hal : 2

HARIAN UMUM NusaBali

Giliran Kadishub Denpasar Diperiksa Kejati

DENPASAR, NusaBali

Dugaan permainan harga dalam pengelolaan penataan reklame di Denpasar terus didalami penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali. Kali ini, giliran Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Denpasar, I Gede Astika yang diperiksa. Total sudah ada lima pejabat Pemkot Denpasar setingkat Kadis yang sudah diperiksa dalam kasus ini.

Astika sendiri datang ke Kajati Bali sekitar pukul 11.00 Wita sesuai surat panggilan penyidik.

Tidak lama setelahnya, Astika langsung naik ke lantai II dan langsung menjalani pemeriksaan hingga pukul 13.00 Wita. Usai pemeriksaan, Astika yang ditemui mengatakan dirinya diperiksa lantaran masuk sebagai Tim Reklame Kota Denpasar bersama beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lainnya.

Astika mengatakan hanya diperiksa terkait tupoksi dalam Tim Reklame tersebut. Dijelaskannya, dalam tim, SKPD yang dipimpinnya hanya memiliki peran memberikan kajian soal tempat-tempat yang bisa dipasangi reklame. Intinya reklame yang dipasang jangan sampai menghalangi rambu lalu lintas. "Dengan demikian, rambu yang dipasang dapat sesuai dengam peruntukannya," jelasnya.

Setelah sesuai dengan ketentuan tersebut, hasil kajian Dishub dikembalikan kepada tim. Nantinya, perijinan akan dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (BPTSP dan PM) Kota Denpasar. Saat ditanya soal penyelewengan yang terjadi, Astika tidak mau menjawabnya.

"Saya hanya ditanya soal itu saja (tupoksi, red)," pungkasnya sambil langsung meninggalkan Kejati Bali. Sementara Kasi Penkum dan Humas Kejati Bali, Azhari Kurniawan membenarkan pemeriksaan terhadap Kadishub Denpasar, I Gede Astika. Sebelumnya, lima pejabat Pemkot Denpasar setingkat Kepala Dinas juga telah dimintai keterangan terkait kasus ini. Mereka di antaranya, Kadis Tata Ruang dan Perumahan (DTRP), Made Kusuma Diputra, Kadis Perijinan Kota Denpasar, AA Gede Rai Soryawan dan Kepala Dinas Pendapatan Kota Denpasar, Dewa Nyoman Semadi, Kadis DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) Ketut Wisada dan Kasatpol PP IB Alit Widarana. rez

Edisi : Selasa, 14 April 2015

Hal : 5

HARIAN UMUM NusaBali

Kejari Negara Akan Ajukan Kasasi ke MA

★ Terkait Vonis Bebas Eks Kadis Perindagkop

NEGARA, NusaBali

Penuntut dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Negara tak terima putusan vonis bebas Pengadilan Tipikor Denpasar untuk terdakwa Ni Made Ayu Ardini yang tersandung kasus dugaan korupsi BBM bersubsidi di UD Sumber Maju. Pihak Kejari Negara memastikan akan mengajukan memori kasasi ke MA terkait vonis bebas untuk eks Kadis Perindagkop Jembrana itu.

Kasi Pidsus Kejari Negara, I Putu Sauca Arimbawa Tusan seizin Kajari Negara mengakui upaya ajukan memori kasasi ke MA. Saat ini pihaknya masih menyiapkan dan mematangkan memori kasasi setelah menerima salinan putusan bebas dari Pengadilan Tipikor Denpasar. "Sampai saat ini kita belum menerima salinan putusannya. Kemungkin Rabu (15/4) ini baru kita terima, setelah itu baru kita pelajari lagi," terang Sauca, Senin (13/4).

Pengajuan memori kasasi direncanakan pada Rabu (22/4) depan atau tepat 14 hari setelah keputusan dikeluarkan. "Kita tetap berupaya, karena memang ada pandangan yang berbeda antara kita dengan hakim," ujarnya. Pihaknya juga menyatakan tetap melanjutkan kasus Made Sueca Antara alias Dek Cok yang juga jadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi BBM bersubsidi. Rencananya, perkara Dek Cok yang masih anggota dewan aktif baru akan diajukan ke Pengadilan Tipikor Denpasar setelah mengajukan memori kasasi terhadap keputusan Ayu Ardini. "Yang Sueca (Dek Cok) nanti setelahnya. Sekarang tinggal rencana dakwaan saja, tinggal kita poles-poles lagi, ditambah-tambah untuk yang kurang," tukasnya. **od**

Edisi : Selasa, 14 April 2015

Hal : 7

HARIAN UMUM NusaBali

Khawatirkan Kualitas Rendah

Pengawasan Proyek Kolam Renang dan IRD Diperketat

DPRD Buleleng melakukan monitoring dan pengawasan proyek pembangunan kolam renang bertaraf internasional di Kelurahan Banyuasri.

• NUSABALI/SUDIRTA

Kekhawatiran itu karena ada indikasi konsultan pengawas tidak serius mengawasi pekerjaan rekanan di proyek senilai puluhan miliar ini.

SINGARAJA, NusaBali

Lembaga DPRD Buleleng mulai mengkhawatirkan kualitas dua proyek prestisius pembangunan gedung Instalasi Rawat Darurat (IRD) RSUD Buleleng dan Kolam Renang bertaraf internasional di Kelurahan Banyuasri, tidak sesuai

Edisi : Selasa, 14 April 2015

Hal : 4

HARIAN UMUM
NusaBali

dengan rencana awal. Kekhawatiran itu menyusul temuan adanya indikasi konsultan pengawas tidak serius mengawasi pekerjaan rekanan.

Lembaga dewan sudah memonitor perkembangan kedua proyek tersebut sejak proyek itu digarap. Maklumlah proyek itu menyedot dana yang cukup besar. Kolam Renang hingga Rp 10 miliar, sedangkan gedung IRD hingga Rp 44 miliar.

Terakhir, Ketua DPRD I Made Adi Purnawijaya bersama Komisi II, kembali turun ke lokasi proyek Kolam Renang di Kelurahan Banyuasri, Senin (13/4) pagi. Hasilnya, tidak ada satupun konsultan pengawas di lokasi proyek.

Justru, rombongan wakil rakyat itu ditemui oleh petugas dari konsultan pengawas pembangunan gedung IRD. Celakanya, petugas tersebut mengaku juga sebagai konsultan pengawas proyek Kolam Renang.

"Tadi (Senin kemarin) kita temukan kejanggalan soal konsultan pengawasnya. Sebelumnya kita kawatirkan pemadatan tanah di proyek kolam renang, makanya kita minta pemadatan itu harus dites dulu," kata Ketua Komisi II, Putu Mangku Budiasa.

Awalnya, rombongan DPRD Buleleng ingin lakukan tes kepadatan tanah di lokasi proyek secara manual. Nah, saat menanyakan pada konsultan pengawas, ternyata yang dicari tidak ada. Selang beberapa menit kemudian, datang staf yang mengaku sebagai konsultan pengawas.

Setelah ditanyakan, ternyata staf tersebut mengaku konsultan pengawas di IRD. "Ini ada apa, jangan-jangan konsultan pengawasnya satu. Kalau seperti ini bagaimana bisa mengawasi dua proyek yang berbeda," ujar politisi PDIP asal Desa Selat ini.

Sementara, Wakil Ketua Dewan I Made Adi Purnawijaya menegaskan, pengawasan dilakukan karena disamping menggunakan dana yang cukup besar, pekerjaan itu pun harus bisa dipertanggungjawabkan dalam hal jaminan mutu dan kualitas sesuai dengan dokumen yang ada.

"Kita bukan mencari kesalahan pmerintah atau siapapun, namun karena proyek ini menggunakan anggaran besar, kami wajib mengawasai dan kelemahan yang ada itu harus diselesaikan sehingga mutu dan kualitas pekerjaan sesuai dengan dokumen perencanaan," katanya.

Terkait temuan-temuan di lokasi proyek, lembaga DPRD berrencana panggil pihak kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, SKPD pengguna anggaran, dan instansi terkait lainnya.

Dewan ingin mendapatkan klarifikasi terkait terkait kelemahan pengawasan proyek kolam renang. "Kami khwatir kalau ini dibiarkan akan berdampak pada mutu dan kualitas pekerjaan proyek itu. Kami akan minta klarifikasi dengan memanggil kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, dan SKPD pengguna anggaran," tegas Adi Purnawijaya. **k19**

Edisi : Selasa, 14 APRIL 2015

Hal : 4